

OPTIMALISASI PERAN HUKUM DALAM TATA KELOLA DAN PENGAWASAN BUMN: KAJIAN PUSTAKA TENTANG UPAYA MEWUJUDKAN BUMN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article examines the optimisation of the role of law in the governance and supervision of State-Owned Enterprises (SOEs) as an effort to realise SOEs that are professional, efficient, and oriented towards the public interest. Through a literature review approach, the study analyses the legal framework governing SOEs, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, and the strengthening of legal oversight mechanisms by both internal and external bodies, including Commissioners/Supervisory Boards, the State Audit Agency, specialised supervisory bodies, the House of Representatives, and law enforcement agencies. The findings indicate that strengthening legal norms, harmonising regulations, enhancing the capacity of officials, and strengthening coordination among supervisory bodies are key to improving SOE governance and ensuring accountability in the management of state finances. Thus, optimising the role of the law serves not only as an instrument for preventing corruption and abuse of authority, but also as a foundation for SOEs to operate professionally, competitively, and in the public interest.

Keywords: role of the law, SOE governance, SOE oversight, Good Corporate Governance, public interest, professional SOEs

Abstrak

Artikel ini mengkaji optimalisasi peran hukum dalam tata kelola dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mewujudkan BUMN yang profesional, efisien, serta berorientasi pada kepentingan publik. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian menganalisis landasan hukum yang mengatur BUMN, implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta penguatan mekanisme pengawasan hukum oleh lembaga internal maupun eksternal, termasuk Komisaris/Dewan Pengawas, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga pengawas khusus, DPR, dan penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan norma hukum, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan koordinasi antar-lembaga pengawas menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola BUMN dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, optimalisasi peran hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga sebagai landasan bagi BUMN untuk beroperasi secara profesional, berdaya saing, dan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Kata kunci: peran hukum, tata kelola BUMN, pengawasan BUMN, Good Corporate Governance, kepentingan publik, BUMN profesional

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi salah satu pelaku utama dalam pengelolaan aset negara sekaligus penyedia layanan publik yang menunjang kesejahteraan rakyat. Kehadiran BUMN berbasis Norma Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan penempatan peranan penting bagi negara melalui